

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup *Auditing*

2.1.1.1 Definisi Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dan Chris E.Hogan yang dialih bahasa oleh Amir Abadi Jusuf (2017:2) *Auditing* adalah:

“*Auditing* adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti atau pengevaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Menurut Sukrisno Agoes (2017:4) *auditing* adalah sebagai berikut:

“*Auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”

Menurut Wiliam F. Messier, Steven M. Glover, Douglas F. Prawitt (2014:12) definisi *Auditing* adalah sebagai berikut :

“*Auditing* adalah proses yang sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang asersi-aseri dalam kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkemprntingan.”

Menurut Hery (2019:10) definisi *auditing* adalah:

“Pengauditan (*auditing*) didefinisikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang

telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya ke pihak-pihak yang berkepentingan.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti yang sesuai mengenai informasi kewajaran atas suatu laporan keuangan untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.1.1.2 Jenis-jenis Auditing

Menurut Arens, *at.al* (2017:12-15) yang diterjemahkan oleh Amir Abdi Jusuf jenis-jenis dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. “Audit Operasional (*Operational audite*)
Audit operasional mengevaluasi efisien dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. pada akhir audit operasional, auditor diharapkan untuk memberikan hasil evaluasi apakah kegiatan suatu entitas atau perusahaan tersebut sudah berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis.
2. Audit ketaatan (*Compliance Audite*)
Audit ketaatan dilakukan untuk menentukan apakah suatu entitas atau perusahaan yang diaudit mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan ini ditunjukkan kepada manajemen perusahaan. Oleh karena itu, proses audit ini biasanya dilakukan oleh auditor yang bekerja pada suatu perusahaan tersebut.
3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statment Audite*)
Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria. Dalam audit laporan keuangan seorang auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan kriteria yang berlaku atau sudah wajar. Bukti-bukti tersebut yang mendasari auditor untuk memberikan opini atas laporan keuangan klien tersebut.”

Menurut Sukrisno Agoes (2017:14-16), jenis-jenis audit dapat dibedakan

atas:

1. “Audit Operasional (*Management Audit*)
Pemeriksaan terhadap oprasi suatu pemeriksan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan efektif, efisien dan ekonomis.

2. Pemeriksaan ketaatan (*Compliance Audit*)
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Pemeriksaan Internal (*Intern Audit*)
Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer (*Computer Audit*)
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan *System Electronic Data Processing* (EDP)

Menurut Hery (2017:12) umumnya audit dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu:

1. “Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan klien secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang diaudit biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan ekuitas, dan laporan arus kas, termasuk ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasannya lainnya.
2. Audit pengendalian internal dilakukan untuk memberikan pendapat mengenai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan klien. Karena tujuan dan tugas yang ada dalam melaksanakan audit pengendalian internal dan audit laporan keuangan yang saling terkait, maka standar audit untuk perusahaan publik mengharuskan audit terpadu atas pengendalian internal dan laporan keuangan.
3. Audit ketaatan dilakukan untuk menentukan sejarah mana aturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang diaudit.
4. Audit operasional dilakukan untuk meriview (secara sistematis) sebagaimana atau seluruh kegiatan organisasi dalam rangka mengevaluasi apakah sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efektif dan efisien. Hasil akhir dari audit operasional adalah berupa rekomendasi kepada manajemen terkait perbaikan operasi. Jenis audit ini sering juga disebut sebagai audit kinerja atau manajemen.
5. Audit forensik dilakukan untuk mendeteksi atau mencegah aktivitas kecurangan.”

2.1.1.3 Tujuan *Auditing*

Pada dasarnya, audit bertujuan agar perusahaan dapat menjadi lebih baik kedepannya. Tujuan suatu perusahaan melakukan audit adalah untuk memeriksa kelengkapan, ketepatan, eksistensi, penilain, klasifikasi, ketepatan, pisah batas (*cut off*) dan pengungkapan dari perusahaan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark A. Beasley, dan Chris E-Hogan (2017:167) tujuan audit adalah:

“Tujuan auditing adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuatu dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan”

Menurut Abdul Halim (2015:157) tujuan audit adalah sebagai berikut:

“tujuan audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Sedangkan tujuan audit menurut SA 700 adalah untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh dan untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis yang juga menjelaskan basis opini tersebut.”

Menurut Mulyadi (2014:194) tujuan audit yaitu sebagai berikut:

“Manajemen perusahaan memperluas jasa pihak ketiga agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan memerlukan jasa ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka. Baik manajemen perusahaan maupun pihak luar perusahaanyang berkempeningan t erhadap perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diinterpretasikan bahwa tujuan audit merupakan perilaku untuk menyatakan suatu pendapat mengenai kewajaran kondisi laporan keuangan perusahaan bahwa sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan suatu audit maka auditor diharuskan dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup sehingga auditor dapat menyatakan pendapat atas kewajaran dan kelayakan suatu laporan keuangan perusahaan sesuai standar audit.

2.1.1.4 Standar Auditing

Untuk mencapai tujuan di dalam auditing, auditor harus berpedoman pada standar pemeriksaan, yang merupakan kriteria ukuran mutu pelaksanaan akuntan. Berbeda dengan prosedur, standar pemeriksaan merupakan hal yang berkenaan dengan mutu pekerjaan akuntan, sedangkan prosedur pemeriksaan adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Menurut Hery (2019:27) standar *auditing* sebagai berikut:

“Pedoman untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya sehubungan dengan audit yang akan dilakukan atas laporan keuangan historis kliennya. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional, seperti kompetensi dan independensi, persyaratan, persyaratan pelaporan, dan bahan bukti audit.”

Menurut Hery (2019:28) standar audit yang berlaku umumnya yaitu dapat dibagi tiga kategori

A. Standar Umum

- a. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
- b. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independensi dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.

- c. Auditor harus menerapkan kemahiran orifesimal dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.

B. Standar Pekerjaan Lapangan

- a. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai resiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan dan selanjutnya untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit.
- c. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan yang diaudit.

C. Standar Pelaporan

- a. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasi mengenai keadaan dimana prinsip akuntansi tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan secara informatif belum memadai, auditor harus menyaakan dalam laporan audit.
- d. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak dapat diberikan. Jika auditor tidak dapat memberikan suatu pendapat, auditor harus menyebutkan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor tersebut harus secara jelas (dalam laporan auditor) menunjukan sifat pekerjaannya, jika ada serta tingkay tanggungjawab yang dipikul oleh auditor bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diinterpretasikan bahwa standar audit merupakan peraturan agar auditor dapat menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksa merupakan laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standar prinsip akuntansi yang berlaku.

2.1.2 Skeptisisme Profesional Auditor

2.1.2.1 Definisi Skeptisisme Profesional Auditor

Skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang harus dimiliki seorang auditor karena mencerminkan sikap kecurangan seorang auditor terhadap perusahaan yang melakukan kecurangan dalam laporan keuangan.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dan Chris E. Hogan yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2017:63) definisi skeptisisme profesional auditor sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional adalah sesuatu sikap auditor yang tidak mengasumsikan kejujuran absolut”

Menurut Hery (2019:204) skeptisisme profesional auditor sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan dan selalu waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan adanya kemungkinan salah saji, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, serta meliputi sikap kritis dalam melakukan penilaian bukti audit.”

Menurut Fandy (2021:124) definisi skeptisisme profesional sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional audit terdiri dari questioning mind, yaitu suatu sikap waspada dan hati-hati terhadap suatu kondisi yang menyebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, dan penilain kritis terhadap bukti audit.”

Menurut Sukrisno Agoes (2019:62) definisi skeptisisme profesional sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional audit adalah ketika auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan audit, memiliki integritas, serta objektif dalam penilaian bukti audit.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diinterpretasikan bahwa skeptisisme profesional auditor merupakan sikap seseorang mempertanyakan sesuatu secara detail, mencakup pemikiran dan keterampilan. Sikap skeptisisme profesional juga merupakan suatu sikap kehati-hatian dan waspada terhadap sesuatu yang memungkinkan terjadi. Dalam melakukan tugas audit, seorang auditor diharuskan memegang sikap skeptisisme profesional, karena sikap tersebut dapat membantu seorang auditor untuk lebih berhati-hati, dan mencari informasi secara detail dalam menjalankan tugas audit agar terhindar dari kecurangan dan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan.

2.1.2.2 Karakteristik Skeptisisme Profesional Auditor

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dan Chris E. Hogan yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2017:183) karakteristik skeptisisme profesional sebagai berikut:

1. Memeriksa dan menguji bukti (*Examination of Evidence*) Karakteristik yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengujian bukti (*Examination of Evidence*) diantaranya:
 - a. pikiran yang selalu bertanya (*Question Mind*) yaitu Karakteristik yang mempertanyakan alasan, penyesuaian dan pembuktian atas sesuatu. Karakteristik skeptic ini dibentuk dari beberapa indikator:
 - 1) Menolak suatu pernyataan atau statment tanpa pembuktian yang jelas.
 - 2) Mengajukan banyak pertanyaan untuk prmbuktian akan suatu hal.
 - b. Suspensi pada penilaian (*Suspension in Judgement*) yaitu karakteristik yang mengindikasikan seseorang butuh waktu lebih yang lebih lama untuk

membuat pertimbangan yang matang dan menambah informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan tersebut.

- 1) Seseorang butuh waktu yang lebih lama.
 - 2) Membutuhkan informasi pendukung untuk mencapai penilaian.
 - 3) Tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum lengkap.
- c. Pencarian pengetahuan (*Search for Knowledge*) yaitu karakteristik yang didasari oleh rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi. Memahami penyediaan informasi (*Understanding Evidence Providers*).
- 1) Berusaha untuk mencari.
 - 2) Sesuatu yang menyenangkan apabila menemukan informasi baru.
2. Memahami penyediaan informasi (*Understanding Evidence Providers*) karakteristik yang berhubungan adalah pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*) yaitu karakter skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi, dan integritas dari penyedia informasi. Karakteristik skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator.
- a. Berusaha untuk memahami perilaku orang lain.
 - b. Berusaha untuk memahami alasan mengapa seseorang berperilaku.
3. Mengambil tindakan atas bukti (*acting on the Evidence*) karakteristik yang berhubungan diantaranya adalah:
- a. Percaya diri (*Self Confidence*) yaitu percaya diri secara profesional untuk bertindak atas bukti yang sudah dikumpulkan.
 - b. Penentuan sendiri (*Self Determination*) yaitu sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif yang sudah dikumpulkan.

2.1.2.3 Unsur-unsur Skeptisisme Profesional Auditor

Unsur-unsur skeptisisme profesional dalam definisi *International Federation of Accountants* (IFAC) dalam Tuankota (2011:78)

1. “A *critical assessment* ada penilaian yang kritis tidak menerima begitu saja.
2. With a questioning mind dengan cara berpikir yang terus menerus bertanya dan mempertanyakan.
3. *Of the validity of audit evidence obtained* keabsahan dari barang bukti yang diperoleh.
4. *Alert to audit evidence that contradicts* waspada terhadap bukti yang kontakdiktif.
5. *Brings into question the realibility of document and responses to inquiries and other* informasi mempertanyakan keandalan dalam dokumen dan jawaban atas pernyataan serta informasi lain.
6. *Obtained from management and thode charge with governance* yang diperoleh dari manajemen yang berwenang dalam pengelolaan (perusahaan).”

2.1.2.4 Pentingnya Skeptisisme Profesional Auditor

Skeptisisme profesional sangat penting bagi seorang auditor karena skeptisisme profesional adalah sikap yang kritis. Maka dari seorang auditor harus memiliki sikap skeptisisme profesional untuk menanyakan keberanaran laporan keuangan supaya tidak terjadi kekeliruan auditor dalam pencatatan laporan keuangan.

Menurut Randal J. Elder Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens yang dialih bahasakan Herman Wibowo (2016:133-134), skeptisisme profesional dalam auditing penting karena:

1. Skeptisisme profesional merupakan syarat yang harus dimiliki auditor yang tercantum di dalam standar audit (SPAP)
2. Perusahaan-perusahaan audit internasional menyaratkan penerapan skeptisisme profesional dalam metodologi audit mereka.
3. Skeptisisme profesional merupakan bagian dari pendidikan dan pelatihan auditor.
4. Literatur akademik dan profesional dibidang auditing menekankan selain itu, banyak studi kasus oleh SEC (*Security and Exchange Commissions*) dilaporkan sebagai kegagalan auditor dalam mendeteksi salah saji material sebagai hasil dari kurangnya skeptisisme profesional, contohnya skandal Enron, *WorldCom*, *Adelphia*, dan *Global Crossing*.

Berdasarkan uraian di atas, dengan adanya sikap skeptisisme profesional dalam diri auditor akan membantu atau memudahkan auditor mencatat laporan keuangan yang tepat. Seorang auditor harus menamakan sikap skeptisisme profesional dengan benar agar bisa mengetahui kesalahan atau kecurangan yang ada di perusahaan yang di auditnya. Maka dari itu skeptisisme profesional ini sangat penting bagi seorang auditor bukan hanya membantu auditor ada juga membantu perusahaan ini baik-baik saja atau perusahaan gak sehat dengan kata lain banyak kecurangan.

2.1.3 Independensi Auditor

2.1.3.1 Definisi Independensi Auditor

Independensi merupakan suatu kondisi atau posisi di mana auditor memiliki sikap bebas atau tidak terkait dengan pihak manapun, dapat diartikan bahwa keberadaan auditor adalah mandiri dengan tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau pihak dan organisasi tertentu.

Menurut Alvin A, Ares, Randal J. Eler, Mark S. Beasley dan Cheis E Hogan yang dialihkan bahasa oleh Amir Jusuf (2017:134) definisi Independensi auditor sebagai berikut:

“Independensi auditor adalah sikap mental yang mengambil pandangan tidak biasa dalam kinerja tes audit selama akuntansi dan evaluasi bukti, evaluasi hasil dan penerbit laporan audit. Independensi auditor dinilai berdasarkan dua standar yaitu dalam fakta dan dalam penampilan.”

Menurut Mulyadi (2013:26-27) dalam Muhammad Reyhan (2018) definisi independensi auditor sebagai berikut:

“Independensi belarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain. Independensi juga belarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapat.”

Sukrisno Agoes (2013:146) mengungkapkan independensi adalah:

“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan.”

Sedangkan menurut Arum Ardiningsih (2021:25) independensi adalah:

“Independensi adalah salah satu hal yang esensial untuk dipenuhi oleh seorang auditor, untuk menjamin kewajaran atas kredibilitas laporan keuangan yang menjadi tanggungjawab manajemen. Jika akuntan tidak bersikap independen maka opini yang diberikannya tidak akan memberi

tambahan nilai apapun. Independensi mencakup sisi tampilan dan kenyataan (*in appearance and in fact*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diinterpretasikan bahwa sikap independensi merupakan sikap kebebasan dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Bebas artinya, auditor dapat beropini yang sebenar-benarnya sesuai dengan bukti yang ada dan tanpa ada nya tekanan atau campur tangan dari pihak manapun. Auditor juga bebas dalam melaksanakan tugas tanpa mudah terpengaruhi. Sikap independensi tersebut perlu dimiliki seorang auditor, karna dengan memegang prinsip kebebasan maka dapat membantu auditor meminimalisir terjadinya kesalahan dalam laporan keuangan yang diperiksa.

2.1.3.2 Jenis-jenis Independensi Auditor

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens yang dialih bahasakan Herman Wibowo (2016:103) mengemukakan dalam independensi terdapat dua unsur, yaitu:

1. Independensi dalam berpikir (*independence in mind*) Independensi dalam berpikir mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak biasa. Independensi dalam berpikir mencerminkan persyaratan lama bahwa anggota harus independensi.
2. Independensi dalam penampilan (*Independence in appearance*) Independensi dalam penampilan merupakan uniterpretasi orang lain terhadap independensi auditor tersebut.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:34) ada tiga aspek dalam indenpendensi auditor, yaitu:

1. "Independensi dalam Fakta (*Independence in Fact*)
Akuntan publik seharusnya independensi, sepanjang dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa profesional, bisa menjaga integritas dan selalu

menaati kode etik, profesi akuntan publik dan standar profesional akuntan publik. Keterkaitan yang erat dengan objektivitas.

2. Independensi dalam Penampilan (*Independence in Appearance*)
Akuntan publik adalah independen karena merupakan pihak di luar perusahaan sedangkan auditor internal tidak independensi karena merupakan pegawai perusahaan. Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.
3. Independensi dalam Pikiran (*Independence in Mind*)
Misalnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi yang memerlukan audit adjustment yang material. Kemudian ia berpikir untuk menggunakan *audite findings* tersebut untuk memeras *audite*. Walaupun baru dipikirkan, belum dilaksanakan, *in mind* auditor sudah kehilangan independensinya.”

Berdasarkan uraian di atas, maka seorang auditor harus bersikap bebas tanpa terpengaruhi oleh pihak manapun yang dapat merubah fakta-fakta yang ditemukan. Auditor juga harus bersikap jujur kepada semua pihak manajemen atau perusahaan dengan tidak meragukan independensi dan obyektifitasnya.

2.1.3.3 Pentingnya Independensi Auditor

Menurut Supriono (2015:12) pentingnya independensi akuntan publik sebagai berikut:

1. Independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi akuntan publik untuk memulai kewajiban informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemakai informasi.
2. Independensi di perlukan oleh akuntan publik untuk memperoleh kepercayaan dari kien dan masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan.
3. Independensi diperoleh agar dapat menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.
4. Jika akuntan publik tidak independen maka pendapat yang dia berikan tidak mempunyai arti atau tidak mempunyai nilai.
5. Independendi merupakan martabat penting akuntan publik yang secara berkesinambungan perlu dipertahankan

2.1.3.4 Aspek Independensi Auditor

Auditor harus selalu menjaga dan mempertahankan mental independensi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang diterapkan oleh IAI.

Menurut Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011:64-65) menekankan tiga aspek dari independensi sebagai berikut:

1. “Independensi Program (*Programming Independence*)
Independensi program adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik dan prosedur audit, dan berapa dalamnya teknik dan prosedur audit.
2. Independensi Investigatif (*Investigative Independence*)
Independensi investigatif adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti, tidak boleh ada sumber informasi yang *legitimate* (sah) yang tertutup bagi auditor.
3. Independensi Pelaporan (*Reporting Independence*)
Independensi pelaporan adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.”

Berdasarkan dari tiga dimensi tersebut, Mautz dan sharaf mengembangkan petunjuk yang mengidentifikasi apakah ada pelanggaran atas independensi. Mautz dan sharaf dalam Theodorus M. Tuankotta (2011:7) menyarankan:

1. “Independensi Program audit (*Programming Independence*)
 - a. Bebas dari tekanan atau intervensi manajerial atau friksi yang dimaksudkan untuk menghilangkan (*eliminate*), menentukan (*specify*) atau mengubah (*modify*) apapun dalam audit.
 - b. Bebas dari intervensi apapun dari sikap tidak kooperatif yang berkenaan dengan penerapan prosedur audit yang dipilih.
 - c. Bebas dari upaya pihak luar yang memaksakan pekerjaan audit itu direview diluar batas-batas kewajaran dalam proses audit.

2. Independensi Investigatif (*Investigative Independence*)
 - a. Akses langsung dan bebas atau seluruh buku, catatan, pimpinan pegawai perusahaan dan sumber informasi lainnya mengenai kegiatan perusahaan, kewajiban dan sumber-sumbernya.
 - b. Kerjasama yang aktif dari pimpinan perusahaan selama berlansungnya kegiatan audit.
 - c. Bebas dari upaya pimpinan perusahaan untuk menugaskan atau mengatur kegiatan yang harus diperiksa atau menentukan dapat diterimanya suatu *evidential mette* (sesuatu yang mempunyai nilai pembuktian).
 - d. Bebas dari kepentingan atau hubungan pribadi yang akan mengilangkan atau membatasi pemeriksaan atas kegiatan, catatan atau orang yang seharusnya masuk dalam lingkup pemeriksaan.
3. Independensi Pelaporan (*Reporting Independence*)
 - a. Bebas dari perasaan royal kepada seseorang atau merasa berkewajiban kepada seorang untuk mengubah dampak dari fakta yang dilaporkan.
 - b. Menghindari praktik untuk mengeluarkan hal-hal penting dari laporan formal dan memasukkannya kedalam laporan informal dalam bentuk apapun.
 - c. Menghindari penggunaan bahasa yang tidak jelas (kabur, samar-samar) baik yang disengaja maupun yang tidak didalam pernyataan fakta, opini dan rekomendasi dalam interpretasi.
 - d. Bebas dari upaya untuk *memveto judgement* auditor mengenai apa yang seharusnya masuk dalam laporan audit, baik yang bersifat fakta maupun opini.”

Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Mautz dan Sharaf sangat jelas dan masih relevan untuk auditor sampai hari ini. Petunjuk-petunjuk tersebut menentukan independen atau tidaknya seorang auditor.

2.1.3.5 Faktor yang mempengaruhi Independensi

Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley (2014:75) menyatakan bahwa ada lima yang mempengaruhi independensi, yaitu sebagai berikut:

1. Kepemilikan Finansial yang Signifikan
Kepemilikan finansial dalam perusahaan yang diaudit termasuk kepemilikan dalam instrumen utang dan modal (misalnya pinjaman dan obligasi) dan kepemilikan dalam instrument *derivative* (misalnya opsi). Standar etika juga melarang auditor menduduki posisi sebagai penasihat, direksi, maupun memiliki saham yang jumlahnya signifikan di perusahaan klien.

2. Pemberian Jasa *Non-Audit*
Konflik kepentingan yang paling nyata bagi Kantor Akuntan Publik dalam memberikan jasa *non-audit* pada kliennya terus menerus menjadi perhatian penting bagi para pembuat regulasi dan pengamat.
3. Imbalan Jasa *Non-Audit* dan Independensi
Cara auditor untuk berkompentensi mendapatkan klien dan menetapkan imbalan jasa audit dapat memberikan implikasi penting bagi kemampuan auditor untuk menjaga independensi auditnya.
4. Tindakan hukum antara KAP dan Klien, serta Independensi
Ketika terdapat tindakan hukum atau niat untuk memulai tindakan hukum antara sebuah KAP dengan kliennya, maka kemampuan KAP dan kliennya untuk tetap objektif dipertanyakan. Tindakan hukum oleh klien untuk jasa perpajakan atau jasa-jasa *non-audit* lainnya, atau tindakan melawan klien maupun KAP oleh pihak lain tidak akan menurunkan independensi dalam pekerjaan audit.
5. Pergantian Auditor
Riset dibandingkan audit mengindikasikan beragam alasan dimana manajemen dapat memutuskan untuk mengganti auditornya. Alasan-alasan tersebut termasuk mencari pelayanan dengan kualitas yang lebih baik, *opinion shopping*, dan mengurangi biaya.

2.1.4 Kompetensi Auditor

2.1.4.1 Definisi Kompetensi Auditor

Kompetensi auditor mengarah pada kemampuan auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit yang didukung oleh keterampilan dan pengetahuan auditor.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:62) definisi kompetensi sebagai berikut:

“Competency as a requirement for auditors to have formal education in field of auditing and accounting adequate practical experience for workers who are being carried out, as well as continuing professional education.”

“Kompetensi merupakan kebutuhan bagi auditor yang didapat auditor melalui pendidikan formal dalam bidang audit dan akuntansi, maupun melalui pengalaman kerja serta pendidikan profesional sejenis.”

Menurut Sukrisno Agoes (2017:146) definisi kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi adalah suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaan dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup, serta mempunyai ilmu/pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencakupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya.”

Menurut Arum Ardiningsi (2018:26) definisi kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diinterpretasikan bahwa suatu audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan pelatihan teknis yang cukup agar tercapainya tugas yang dijalankan dengan hasil yang maksimal.

2.1.4.2 Standar Kompetensi Auditor

Menurut pernyataan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017:36) standar pemeriksaan harus secara kolektif memiliki kompetensi sebagai berikut:

- a. “Latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman, serta pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan.
- b. Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa.
- c. Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan.”

2.1.4.3 Karakteristik Kompetensi Auditor

Menurut M. Lyle Spencer dan M. Sine Spencer, Mitrani *et, al* yang dikutip oleh Surya Darma (2013:110-111) terdapat lima karakteristik kompetensi, yaitu:

1. *Motives* adalah sesuatu di mana seseorang secara konsisten berfikir sehingga ia melakukan tindakan.
2. *Traits* adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu.
3. *Self Concept* adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.
4. *Knowledge* adalah pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu.
5. *Skill* adalah kemampuan untuk melaksanakan sesuatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

2.1.4.4 Aspek Kompetensi Auditor

Menurut Timothy J. Louwers, *et.al* (2013:43), definisi aspek kompetensi auditor sebagai berikut:

“kompetensi dimulai dari tingkatan pendidikan di bidang akuntansi karena auditor yang memiliki tingkatan pendidikan yang menunjang akan mapu memahami standar akuntansi atas laporan keuangan dan standar audit secara lebih baik. Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah tingkat pendidikan formal ditingkat universitas sebagai langkah awal dalam memulai karir sebagai seorang auditor, selain itu seorang auditor juga dituntut untuk melanjutkan pendidikan profesional agar pengetahuan yang dimiliki tetap relevan dengan perubahan yang terjadi. Pada faktanya salah satu syarat utama untuk mendapatkan gelar CPA (*Certified Public Accountant*) adalah melanjutkan pendidikan profesional, dan aspek utama lainnya yang tidak kalah penting adalah pengalaman.”

Berdasarkan teori yang dikumpulkan di atas, kompetensi auditor akan diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Timothy J. Louwers, *et.al* (2013:43), yang meliputi:

1. “Pengetahuan (*Knowledge*) Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki Pengetahuan (*Knowledge*) untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan ini meliputi :
 - a. Memiliki kemampuan untuk melakukan *review* analisis. *Review* analisis terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non keuangan (Alvin Arens 2014:216)

- b. Memiliki pengetahuan tentang *auditing*. Pengetahuan tentang *auditing* meliputi penerapan standar. Standar *auditing* merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggungjawab profesionalnya. Standar ini mencakup pertimbangan seperti kompetensi, independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti. (Alvin Arens 2014:36)
 - c. Memiliki pengetahuan dasar tentang segala hal yang berkaitan tentang lingkungan organisasi dan entitas bisnis, dalam hal ini adalah penggunaan perangkat lunak audit, dan lingkungan berbasis *electronic data processing* (EDP).
2. Pendidikan (*Education*) Kriteria pendidikan yang harus dimiliki auditor antara lain:
- a. Memiliki tingkat pendidikan formal yang mendukung dalam proses audit.
 - b. Memiliki tingkat pendidikan lanjutan profesi auditor
3. Pengalaman (*Experience*) Dalam menjalankan tugas sebagai seorang auditor, pengalaman merupakan dimensi lain dari kompetensi yang memudahkan auditor menemukan kesalahan yang tidak umum dalam audit. Pengalaman dalam hal ini meliputi:
- a. Pengalaman dalam melakukan auditing dalam berbagai entitas bisnis
 - b. Pengalaman dalam penggunaan teknologi informasi dalam lingkungan bisnis berbasis *electronic data processing* (EDP) maupun audit pada umumnya dengan tujuan efektivitas dan efisiensi audit.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diinterpretasikan bahwa aspek dari kompetensi tersebut adalah pengetahuan, pendidikan dan pengalaman. Dengan tingginya pendidikan dan banyaknya penyalaman auditor itu yang membuat seorang auditor lebih berkompetensi dalam menjalankan pekerjaan.

2.1.5 Efektivitas Pendeteksian Kecurangan

2.1.5.1 Definisi Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat tau memiliki tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif dari beberapa pilihan. Efektivitas juga

diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Alfred F. Kaunang (2013:71)

“Efektivitas adalah menyelesaikan sasaran yang dipilih setelah mempertimbangkan alternatif yang sudah ada.”

Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:167)

“Efektivitas adalah produk akhir suatu kegiatan operasi yang telah mencapai tujuannya baik ditinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, maupun batas waktu yang ditargetkan.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diinterpretasikan merupakan hasil akhir atas suatu kegiatan yang telah ditetapkan dan untuk mencapai tujuannya dengan cara mempertimbangkan pilihan yang ada.

2.1.5.2 Definisi Pendeteksian Kecurangan

Kecurangan merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja. Tindakan kecurangan biasanya terjadi karena pengambilan atau pencurian harta atau aset milik organisasi.

Karyono (2013:91) definisi pendeteksian kecurangan yaitu

“Deteksi fraud adalah tindakan untuk mengetahui bahwa fraud terjadi siapa pelakunya, siapa korbannya, dan apa penyebabnya.”

Menurut Zimbelmand dkk (2014:487)

“Pendeteksian kecurangan merupakan kegiatan pencarian atau kegiatan mendapatkan kemungkinan kecurangan atau indikasi kecurangan.”

Hiro Tugiman (2019:32) definisi kecurangan sebagai berikut:

“Kecurangan adalah suatu susunan ketidak beresan dan perbuatan ilegal yang merupakan suatu muslihat yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian organisasi yang dilakukan oleh orang luar dan atau dalam organisasi.”

Menurut Cris Kuntandi (2017:13) pengertian kecurangan adalah sebagai berikut:

“Kecurangan merupakan tindakan yang disengaja dan direncanakan dengan menggunakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari posisi kepercayaan dan kewenangan yang dimiliki. Perbuatan tersebut disengaja atau diniatkan untuk menghilangkan uang atau harta dengan cara akal bulu, penipuan, atau cara lain yang tidak wajar.”

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:17) definisi kecurangan adalah sebagai berikut:

“Kecuranga (*fraud*) secara singkat dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau penyembunyian fakta yang material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu.”

The insititute of auditor Auditor di Amerika yang dialih bahasakan oleh Amin Widjaja Tunggal mendefinisikan kecurangan yaitu:

“kecurangan mencakup suatu kesatuan ketidak beresan (*irregularities*) dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Dapat dilakukan untuk manfaat dan/atau kerugian oleh orang di luar atau dalam organisasi.”

Dari definisi di atas dapat diinterpretasikan bahwa kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan sengaja, dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang bukan merupakan hak pelakunya.

2.1.5.3 Jenis Jenis Kecurangan

Ada beberapa jenis kecurangan yang sering terjadi saat ini. Bahkan kecurangan ini tidak hanya melibatkan kalangan menengah ke atas akan tetapi semua kalangan terlibat. Berbagai macam orang untuk mendapat keuntungan sendiri atau kelompok.

Menurut Mark F. Zimbelman dkk yang diterjemahkan oleh novita puspasari, suhernita (2014:12) jenis-jenis kecurangan adalah sebagai berikut:

1. Kecurangan dengan perusahaan atau organisasi sebagai korbanya.
 - a. Kecurangan pegawai
Kecurangan oleh pegawai merupakan jenis occupational fraud yang paling umum. Kecurangan jenis ini pegawai melakukan penipuan terhadap pemilik perusahaan tempat mereka kerja dengan cara mengambil aset perusahaan.
 - b. Kecurangan pemasok
Kecurangan pemasok adalah sebuah penipuan yang dilakukan oleh kontraktor besar dengan cara memanipulasi tagihan yang berlebihan.
 - c. Kecurangan pelanggan
Kecurangan pelanggan terjadi ketika pelanggan tidak membayar barang yang mereka beli atau mereka mendapatkan sesuatu tanpa mengorbankan sesuatu.
2. Kecurangan manajemen
Kecurangan manajemen sering juga disebut sebagai kecurangan laporan keuangan dan lebih dikenal dibandingkan dengan jenis kecurangan lainnya baik dari sifat dasar perilaku maupun dari segi metode penipuannya. Kecurangan manajemen melibatkan manipulasi yang bersifat menipu dalam laporan keuangan oleh manajemen puncak.
3. Penipuan investasi dan kecurangan pelanggan dan lainnya
Penipuan investasi sangat terkait dengan kecurangan manajemen. Dalam skema penipuan ini, investasi yang curang dan biasanya tidak

bernilai dijual pada investor yang tidak menaruh rasa curiga. Beberapa bentuk skema kecurangan yang paling umum sebagai berikut:

- a. Skema ponzi
 - b. Kecurangan telemarketing
 - c. Surat Nigeria atau skema penipuan uang
 - d. Penipuan identitas
4. Kecurangan-kecurangan lainnya

Sedangkan menurut Bono P. Purba (2015:10) terdapat 3 jenis kecurangan yang biasanya dilakukan dalam perusahaan atau organisasi yakni diantaranya sebagai berikut:

1. Kecurangan atas Laporan (*Fraudulent Statement*)
 Pada umumnya kecurangan atas laporan dilakukan dengan cara melaporkan harta dan pendapatan lebih tinggi daripada yang seharusnya atau melaporkan kewajiban dan biaya yang lebih rendah daripada seharusnya. Kecurangan atas laporan keuangan yang bersifat non keuangan yang berbentuk penyalahgunaan kepercayaan pemberi kerja, manipulasi dan pemalsuan dokumen.
2. Kecurangan Aset (*Asset Misappropriation*)
 Penyalahgunaan aset dibagi kedalam 2 kelompok besar yakni:
 - a. *Farund* kas
 Pencurian kas terdiri dari 3 jenis yakni pencurian kas (*cash larceny*), *skimming* dan kecurangan pengeluaran kas (*Fraudulent disbursements*). Pencurian kas terjadi terhadap kas yang sudah tercatat dalam pembukuan baik kas yang diterima atau kas yang disimpan di kantor maupun bank. *Skimming* terjadi terhadap pencurian kas yang belum tercatat dalam pembukuan hal yang dilakukan yaitu tidak mencatat penjualan atau mencatat penjualan lebih rendah. Sedangkan kecurangan pengeluaran kas dilakukan terhadap pengeluaran kas perusahaan dengan skema faktur, skema penggajian, skema penggantian biaya, pemalsuan *check*, *tampering* dan *register disbursement*.
 - b. Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*Inventory and All Other Assets*)
 Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya adalah penyalahgunaan segala bentuk aset yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi selain yang berbentuk kas. Bentuk kecurangan ini dapat berupa pemakaian aset tanpa izin (*misuse*) dan pencurian (*larceny*). Aset yang biasanya disalahgunakan seperti kendaraan perusahaan, peralatan kantor, komputer dan perabot kantor lainnya. Bentuk-bentuk kecurangan persediaan terdiri dari pencurian persediaan, skema permintaan dan pemindahan aset, *false billing and purchasing receiving scheme* dan skema pemalsuan pengiriman.

3. Korupsi

Korupsi merupakan kecurangan di luar pembukuan yang terjadi dalam bentuk komisi, hadiah atau gratifikasi yang dilakukan kontraktor atau pemasok kepada pegawai pemerintahan atau kepada pegawai atau pejabat organisasi. korupsi dapat digolongkan ke dalam empat jenis yakni:

- a. Konflik kepentingan (*Conflict of Interest*)
Bentuk korupsi ini terjadi ketika seorang pegawai atau manajer atau eksekutif mempunyai kepentingan ekonomis pribadi dalam transaksi bertentangan dengan pemberian kerja. Kepentingan pribadi tersebut tidaklah selalu kepentingan pelaku sendiri tetapi bisa kepentingan orang lain walaupun dia sendiri tidak memperoleh keuntungan secara finansial atas tindakan kecurangan tersebut.
- b. Gratifikasi yang tidak sah (*Illegal Gratuity*)
Gratifikasi yang tidak sah adalah pemberian sesuatu (yang mempunyai nilai) kepada seseorang disertai niat untuk mempengaruhinya dalam pengambilan keputusan tertentu. Pemberian ini dilakukan oleh orang atau pihak tertentu yang mempunyai kepentingan dalam keputusan yang akan diambil.
- c. Suap (*Bribery*)
Suap didefinisikan sebagai penawaran, pemberian janji kepada pejabat atau pegawai yang bertujuan untuk mempengaruhi aktivitas pejabat atau pegawai untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pihak pemberi janji. Kecurangan ini dapat terjadi dalam bentuk pemberian komisi (*kickbacks*) yang besarnya telah disepakati kedua belah pihak.
- d. Pemasaran (*Economic Extortion*)
Kecurangan ini berbeda dengan suap. Pemasok atau kontraktor bukan menawarkan pemberian untuk mempengaruhi pembeli, tetapi justru pihak pembeli dari perusahaan atau organisasi yang meminta pemasok untuk membayar dalam jumlah tertentu agar keputusan yang diambil dapat menguntungkan pemasok.

Dari uraian di atas, dapat diinterpretasikan bahwa begitu banyak jenis-jenis kecurangan. Demi mendapatkan keuntungan segala sesuatu meskipun merugikan orang lain. Beberapa kali tindakan ini terulang tanpa ada efek jera bagi pelaku tindakan kecurangan ini.

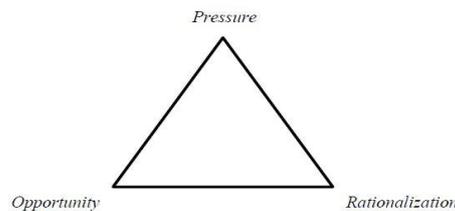
2.1.5.4 Faktor yang mendorong terjadinya kecurangan

Menurut Arum Ardianingsih (2018:76) faktor pendorong terjadinya kecurangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori $C=N+K$

Teori ini sangat dikenal dalam profesi kepolisian. Simbol C menyatakan Criminal (C) sama dengan Niat (N) dan Kesempatan (K). Teori ini sangat sederhana dan gamblang karena meskipun ada niat melakukan kecurangan, namun jika tidak ada kesempatan maka kecurangan tidak akan terjadi demikian pula sebaliknya. Kesempatan ada pada orang yang mempunyai kewenangan otoritas sedangkan niat ditentukan oleh moral dan integritas.

2. Teori segitiga Fraud (*fraund Triangle Theory*)



Gambar 2. 1 Teori segitiga Fraud

Teori ini dikembangkan oleh Dr. Donald Cressy. Dalam teori segitiga *fraund* perilaku kecurangan didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan dan pembenaran.

a. Tekanan (*Pressure*)

Dorongan untuk melakukan kecurangan terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan dorongan itu terjadi antara lain karena:

- 1) Tekanan keuangan, antara lain berupa banyak hutang, gaya hidup melebihi kemampuan keuangan, keserakahahan dan kebutuhan yang tidak terduga.
- 2) Kebiasaan buruk antara lain kecanduan narkoba, judi dan *alcoholic*.
- 3) Tekanan lingkungan kerja seperti kurang dihargainya prestasi atau kinerja, gaji rendah dan tidak puas pada pekerjaan.
- 4) Tekanan lain seperti tekanan dari istri atau suami untuk memiliki barang-barang mewah.

b. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan yang timbul karena lemahnya sanksi, lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan serta ketidak mampuan untuk menilai kualitas kinerja. Menurut Steve Albercht, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan yaitu:

- 1) Terbatasnya akses terhadap informasi
- 2) Ketidaktahuan, males dan tidak sesuai kemampuan pegawai
- 3) Kurangnya jejak audit

c. Pembeneran (*Rationalization*)

Pembeneran adalah tindakan mencari alasan bahwa apa yang dilakukan benar dan biasa terjadi atau lazim di masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku merasa berjasa besar terhadap perusahaan dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang diterimanya.
- 2) Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu ingin mengatasi masalah dan nanti akan dikembalikan

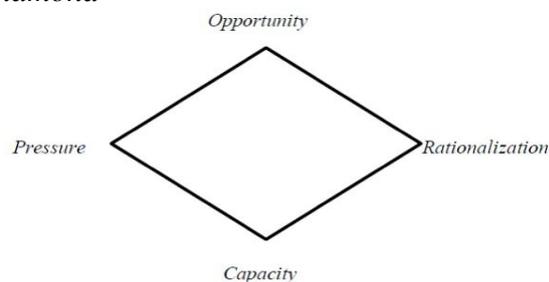
3. Teori GONE (*Gone Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Jack Balogna pada tahun 1995 dengan menggunakan unsur-unsur kecurangan sebagai berikut:

- a. *Greed* (Keserakahan), berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada di dalam dirinya.
- b. *Opportunity* (Kesempatan), berkaitan dengan keadaan instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.
- c. *Need* (Kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang menurutnya wajar.
- d. *Exposure* (Pengungkapan), berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

Greed dan *need* adalah faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (faktor individu). *Opportunity* dan *exposure* adalah faktor yang berhubungan dengan organisasi korban kecurangan (faktor genetik). Dalam hal ini resiko terjadinya kecurangan bergantung pada kedudukan pelaku objek kecurangan.

4. Teori *Fraud Diamond*



Gambar 2. 2 Teori Fraud Diamond

Fraud diamond merupakan sebuah pandangan baru tentang fenomena *fraud* yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson. *Fraud diamond*

adalah bentuk penyempurnaan dari teori *fraund triangle*. Wolfe dan Hermanson berpendapat bahwa banyak *fraund* yang umumnya bernilai besar tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan kapabilitas khusus yang ada dalam perusahaan. *Opportunity* membuka peluang atau pintu masuk bagi *fraund*, *pressure* dan *rationalization* yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraund*.

2.1.5.5 Upaya Auditor dalam Efektivitas Pendeteksian Kecurangan

Menurut Eko Sudarmanto (2021:215) melakukan efektivitas pendeteksian kecurangan terdapat beberapa upaya auditor sebagai berikut:

1. Menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi. Salah satu tanggung jawab organisasi adalah menumbuhkan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi dan menjelaskan perilaku yang diharapkan dan kesadaran dari masing-masing pegawai, menciptakan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika tinggi hendaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. *Setting tone the at the top*
 - b. Merekrut dan mempromosikan karyawan yang tepat
 - c. Pelatihan
 - d. Disiplin
2. Penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti-*fraund*. Kecurangan tidak akan terjadi tanpa persepsi adanya kesempatan dan menyembunyikan perbuatannya organisasi hendaknya proaktif mengurangi kesempatan dengan:
 - a. Mengidentifikasi dan mengukur resiko *fraund*
 - b. Pengurangan resiko *fraund*
 - c. Implementasi dan monitoring pengendalian internal dengan baik
3. Pengembangan proses pengawasan (*oversight process*). Untuk mencegah dan menangkal kecurangan secara efektif, entitas hendaknya memiliki fungsi pengawasan yang tepat, pengawasan dalam berbagai jenis dan bentuk ini dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak, antara lain komite audit, manajemen dan internal auditor.

Menurut Karyono (2013:92-94) kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan antara lain:

1. Kemampuan pengajuan pengendalian intern

Pengajuan pengendalian intern ini meliputi pengajuan pelaksanaan secara mendadak dan secara acak. Hal ini untuk pendeteksian kecurangan yang dilakukan dengan kolusi sehingga pengendalian intrn yang ada tidak berfungsi efektif.
2. Kemampuan audit keuangan atau oprasional

Pada kedua jenis audit ini tidak ada keharusan auditor untuk mendeteksi dan mengungkapkan adanya kecurangan, akan tetapi auditor harus merancang dan melaksanakan auditnya sehingga kecurangan dapat terdeteksi.

3. Kemampuan mengumpulkan informasi dengan teknik elisitasi
Pengumpulan informasi dengan teknik elisitasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi. Cara pendeteksian kecurangan ini dilakukan secara tertutup dan secara diam-diam mencari informasi tentang pribadi seseorang yang sedang di curigai sebagai pelaku kecurangan.
4. Kemampuan penggunaan prinsip pengecualian dalam pengendalian dan prosedur
Pengecualian yang dimaksud di sini adalah:
 - a. Adanya pengendalian intern yang tidak dilaksanakan atau dikompromikan
 - b. Transaksi-transaksi yang janggal, misalnya: waktu transaksi terlalu menyimpang dari biasanya
 - c. Tingkat motivasi, moral, dan keputusan kerja terus menerus
 - d. Sistem pemberian penghargaan yang ternyata mendukung perilaku tidak etis
5. Kemampuan mengkaji ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi
Dalam hasil uji diperoleh penyimpangan yang cocok dalam hal anggaran, rencana kerja, tujuan dan sasaran organisasi. penyimpangan tersebut bukan karena adanya sebab yang wajar dari aktivitas bisnis yang lazim.
6. Pendekatan reaktif
Pendekatan reaktif meliputi adanya pengaduan dan keluhan karyawan, kecurigaan dan intuisi atasan.

2.1.5.6 Tujuan Pendeteksian Kecurangan

Menurut Karyono (2013:47) tujuan pendeteksian kecurangan sebagai berikut:

1. *“Prevention* (mencegah terjadinya kecurangan)
2. *Detterence* (menangkal pelaku potensial)
3. *Disruption* (mempersulit gerak langkah pelaku kecurangan)
4. *Indetification* (mengidentifikasi kegiatan beresiko tinggi dan kelemahan pengendalian intern)
5. *Prosecution* (tuntutan kepada pelaku)

2.1.5.7 Pendeteksian Kecurangan yang Efektif

Agar perusahaan atau instansi dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien harus dilakukan sebuah pendeteksian kecurangan. Pendeteksian kecurangan yang tidak efektif menjadi peluang untuk terjadinya kecurangan. Agar kecurangan

tersebut tidak terjadi maka dapat dilakukan dengan memperhatikan pencapaian tujuan pendeteksian kecurangan. Menurut BPKP (2008) dalam Eko Sudarmanto dkk (2021:214) tujuan pendeteksian kecurangan sebagai berikut:

1. Pencegahan (*Prevention*)
2. Penangkalan (*Deterrence*)
3. Pemutusan (*Disruption*)
4. Pengidentifikasian (*Indetification*)
5. Penuntutan (*Prosecution*)

Jadi efektivitas pendeteksian kecurangan dapat dinilai efektif apabila telah tercapai tujuam dari pendeteksian kecurangan instansi atau perusahaan itu sendiri.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Skeptisisme Profesional Terhadap Efektivitas Pendeteksian Kecurangan

Menurut Menurut Alvin A. arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dan Chris E.Hogan yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2017:63) definisi skeptisisme profesional sebagai berikut:

“Skeptisisme profesional adalah sesuatu sikap auditor yang tidak mengasumsikan kejujuran absolut”

Skeptisisme profesional auditor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan, dengan hasil ini maka dapat dilihat bahwa semakin tingginya skeptisisme profesional auditor maka akan semakin tinggi pendeteksian kecurangan (Floreta Wiguna: 2015).

Skeptisisme profesional berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan karena dari arti skeptisisme profesional sendiri adalah sikap kritis seorang auditor terhadap klien. Dan juga dari hasil penelitian menyebutkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Semakin seorang auditor memegang sikap skeptisisme profesional maka akan semakin tinggi efektivitas pendeteksian kecurangan.



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran Pengaruh Skeptisisme profesional terhadap Efektivitas pendeteksian kecurangan

2.2.2 Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Efektivitas Pendeteksian Kecurangan

Menurut Alvin A. Ares, Randal J. Eler, Mark S. Beasley dan Cheis

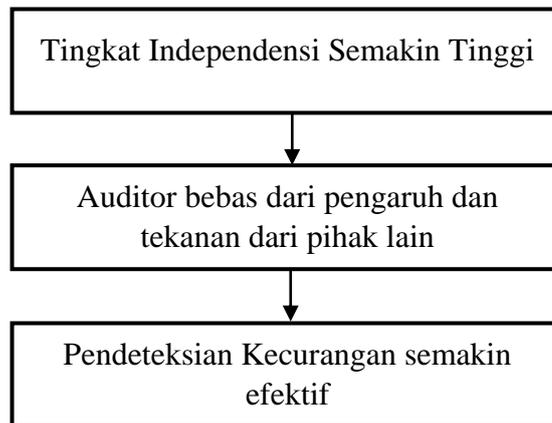
E Hogan yang dialihkan bahasa oleh Amir Jusuf (2017:134)

“Independensi auditor adalah sikap mental yang mengambil pandangan tidak bias dalam kinerja tes audit selama akuntansi dan evaluasi bukti, evaluasi hasil dan penerbit laporan audit. Independensi auditor dinilai berdasarkan dua standar yaitu dalam fakta dan dalam penampilan.”

Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Karena semakin tinggi sikap

independensi yang dimiliki auditor, maka semakin meningkat pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. (Trinanda Hanum Harta :2016)

Berdasarkan uraian di atas independensi adalah sikap bebas tanpa ada nya pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Sehingga sikap independensi sangat dibutuhkan oleh seorang auditor dalam melakukan pengauditan. Dapat diinterpretasikan bahwasannya independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan.



Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran Pengaruh Independensi terhadap Efektivitas Pendeteksian Kecurangan

2.2.3 Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Efektivitas Pendeteksian Kecurangan

Menurut Wibowo (2016:271)

“Kompetensi merupakan kemampuan auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit yang didukung oleh keterampilan dan pengetahuan yang dimikinya.”

Menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Seorang auditor memerlukan kompetensi agar dapat mendeteksi dengan cepat dan tepat ada atau tidaknya kecurangan pada laporan keuangan suatu perusahaan. Sehingga seorang auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi, maka akan dapat membantu auditor untuk mendeteksi kecurangan (Trinanda Hanum Harta 2016)

Dari uraian di atas bahwa kompetensi adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seorang auditor. Maka dari itu kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan dalam menyusun laporan keuangan.



Gambar 2. 5 Kerangka Pemikiran Kompetensi auditor terhadap Efektivitas Pendeteksian Kecurangan

2.2.4 Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi Auditor Dan Kompetensi Auditor Terhadap Efektivitas Pendeteksian Kecurangan

Menurut Zimbelmand dkk (2014:487)

“Pendeteksian kecurangan merupakan kegiatan pencarian atau kegiatan mendapatkan kemungkinan kecurangan atau indikasi kecurangan.”

Skeptisisme profesional sangat penting dalam pendeteksian kecurangan, karena skeptisisme profesional adalah sikap seorang auditor yang cenderung kritis terhadap pelaksanaan pengauditan laporan keuangan. Sehingga auditor tidak akan percaya begitu saja terhadap penjelasan klien dan auditor akan terus mengajukan pertanyaan kritis dalam mengumpulkan bukti audit yang relevan terhadap suatu objek yang diteliti.

Independensi adalah kebebasan seorang auditor dari pihak lain atau dalam artian lain tidak terpengaruh oleh siapapun sekalipun mendapatkan tekanan atau gangguan dari berbagai pihak. Sehingga independensi sangat berpengaruh terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan agar pelaksanaan pengauditan tidak terjadi kesalahan atau kecurangan.

Kompetensi adalah pengetahuan atau keterampilan dalam melakukan pengauditan laporan keuangan. Kompetensi juga berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Dengan auditor memiliki pengetahuan atau keterampilan itu, auditor dapat mengerjakannya dengan cepat dan tepat. Maka kompetensi akan dapat membantu auditor dalam efektivitas pendeteksian kecurangan.

2.2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Floreta Wiguna, Dini Wahyu Hapsari (2015)	Pengaruh Skeptisisme Profesional dan Independensi Auditor Terhadap Pedeteksian Kecurangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skeptisisme Profesional berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan 2. Independensi berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan
2	Ida Ayu Idira Biksa dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2016)	Pengaruh Pengalaman, Independensi, dan Skeptisisme Profesional Auditor pada Pendeteksian Kecurangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan 2. Independensi berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan 3. Skeptisisme Profesional berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan
3	Muhammad Rafnes dan Nora Hilmia Primasari (2020)	Pengaruh Skeptisisme Profesional, Pengalaman Auditor, Kompetensi Auditor Dan Beban Kerja Terhadap Pendeteksian Kecurangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skeptisisme Profesional tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan 2. Pengalaman Auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan 3. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan 4. Beban Kerja berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan
4	Nur Fitri Septiani dan Rinny Meidiyustiani (2020)	Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi, Kompetensi dan Etika Auditor Terhadap Kemampuan Auditor Dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skeptisme Profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan 2. Independensi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor

		Pendeteksian Kecurangan	dalam pendeteksian kecurangan 3. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan 4. Etika Auditor berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan
5	Trinanda Hanum Hartan (2016)	Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi dan kompetensi terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi kecurangan	1. Skeptisisme Profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi kecurangan 2. Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi kecurangan 3. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi kecurangan
6	Welly, Rosalina Ghazali, dan Ida Zuraidah (2022)	Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor, Kompetensi Auditor, dan Pengalaman Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan	1. Skeptisisme Profesional auditor berpengaruh dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan 2. Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan 3. Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan

Berdasar penelitian terdahulu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendeteksian kecurangan, yaitu :

1. Skeptisisme Profesional, diteliti oleh Floreta Wiguna, Dini Wahyu Hapsari (2015), Ida Ayu Biksa dan I dewa Nyoman Wiratmaja (2016), Muhammad

- Rafnes dan Nora Hilmia Primasari (2020), Nur Fitri Septiani dan Rinny Meidiyustiani (2020), Trinanda Hanum Hartan (2016), Welly, Rosalina Ghazali, dan Ida Zuraidah (2022).
2. Independensi, diteliti oleh Floreta Wiguna, Dini Wahyu Hapsari (2015), Ida Ayu Biksa dan I dewa Nyoman Wiratmaja (2016), Nur Fitri Septiani dan Rinny Meidiyustiani (2020), Trinanda Hanum Hartan (2016).
 3. Kompetensi, diteliti oleh Muhammad Rafnes dan Nora Hilmia Primasari (2020), Nur Fitri Septiani dan Rinny Meidiyustiani (2020), Trinanda Hanum Hartan (2016), Welly, Rosalina Ghazali, dan Ida Zuraidah (2022).
 4. Beban kerja, diteliti oleh Muhammad Rafnes dan Nora Hilmia Primasari (2020).
 5. Etika auditor, diteliti oleh Nur Fitri Septiani dan Rinny Meidiyustiani (2020).
 6. Pengalaman, diteliti oleh Ida Ayu Biksa dan I dewa Nyoman Wiratmaja (2016), Muhammad Rafnes dan Nora Hilmia Primasari (2020), Welly, Rosalina Ghazali, dan Ida Zuraidah (2022).
 7. Pendeteksian kecurangan, diteliti oleh Floreta Wiguna, Dini Wahyu Hapsari (2015), Ida Ayu Biksa dan I dewa Nyoman Wiratmaja (2016), Muhammad Rafnes dan Nora Hilmia Primasari (2020), Nur Fitri Septiani dan Rinny Meidiyustiani (2020), Trinanda Hanum Hartan (2016), Welly, Rosalina Ghazali, dan Ida Zuraidah (2022)

Tabel 2. 2 Faktor-Faktor yang diduga mempengaruhi efektivitas pendeteksian kecurangan

Nama Penelitian	Tahun	Skeptisisme Profesional	Independensi	Kompetensi	Beban Kerja	Etika Auditor	Pengalaman	Pendeteksian kecurangan
Floreta Wiguna, Dini Wahyu Hapsari	2015	✓	✓	-	-	-	-	✓
Ida Ayu Idira Biksa dan I Dewa Nyoman Wiratmaja	2016	✓	✓	-	-	-	✓	✓
Muhammad Rafnes dan Nora Hilmia Primasari	2020	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
Nur Fitri Septiani dan Rinny Meidiyustiani	2020	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
Trinanda Hanum Hartan	2016	✓	✓	✓	-	-	-	✓
Welly, Rosalina Ghazali, dan Ida Zuraidah	2022	✓	-	✓	-	-	✓	✓
Shendy Sheptian	2023	✓	✓	✓	-	-	-	✓

Keterangan:

Tanda ✓ = Diteliti

Tanda - = Tidak Diteliti

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan variabel-variabel yang diteliti penulis dengan peneliti sebelumnya. Adapun skeptisisme

profesional auditor yaitu dengan Floreta Wiguna dan Dini Wahyu Hapsa(2015), Ida Ayu Idira Biksa dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2016), Muhammad Rafnes dan Nora Hilmia Primasari (2020), Nur Fitri Septiani dan Rinny Meidiyustiani (2020), Trinanda Hanum Hartan (2016) dan Welly, Rosalina Ghazali, dan Ida Zuraidah (2022). Untuk persamaan variable Independensi auditor yaitu dengan penelitian Floreta Wiguna, Dini Wahyu Hapsari(2015), Ida Ayu Idira Biksa dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2016), Nur Fitri Septiani dan Rinny Meidiyustiani (2020) dan Trinanda Hanum Hartan (2016). Selanjutnya untuk persamaan variable Kompetensi auditor yaitu pada penelitian Muhammad Rafnes dan Nora Hilmia Primasari (2020), Nur Fitri Septiani dan Rinny Meidiyustiani (2020), Trinanda Hanum Hartan (2016) dan Welly, Rosalina Ghazali, dan Ida Zuraidah (2022).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Rafnes dan Nora Hilmia Primasari(2020) Pengaruh Skeptisisme Profesional, Pengalaman Auditor, Kompetensi Auditor Dan Beban Kerja Terhadap Pendeteksian Kecurangan dan penelitian yang dilakukan oleh Welly, Rosalina Ghazali, dan Ida Zuraidah (2022) dengan judul Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor, Kompetensi Auditor, dan Pengalaman Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan.

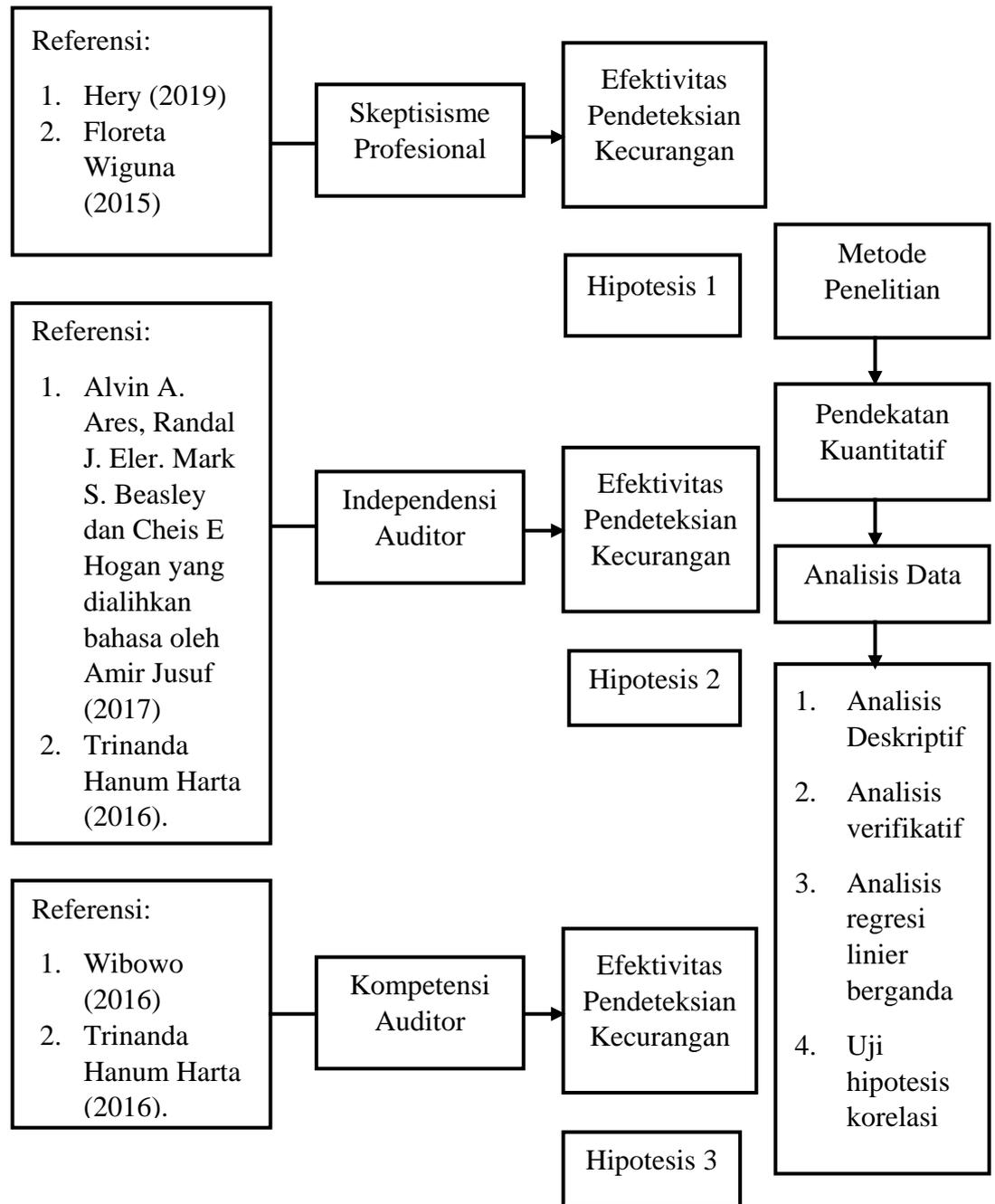
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Muhammad Rafnes dan Nora Hilmia Primasari(2020) terdapat pada variabel (X) Pengalaman Auditor dan Beban Kerja ada juga perbedaan di Tempat dan Waktu Penelitian. Sedangkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Welly, Rosalina Ghazali, dan Ida

Zuraidah (2022) terdapat pada variabel (X) yaitu Pengalaman Auditor dan pada Tempat dan Waktu penelitian.

2.2.6 Paradima Kerangka Pemikiran

Landasan teori			
Skeptisisme profesional	Independensi	Kompetensi	Efektivitas Pendeteksian Kecurangan
1. Alvin A. arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dan Chris E.Hogan yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2017:63)	1. Alvin A, Ares, Randal J. Eler. Mark S. Beasley dan Cheis E Hogan yang dialihkan bahasa oleh Amir Jusuf (2017:134)	1. Alvin A. Arens, Randal J.Elder, Mark S. Beasley (2015:62)	1. Ravianto (2014:11)
2. Hery (2019:204)	2. Mulyadi (2013:26-27)	2. Sukrisno Agoes (2017:146)	2. Gibson <i>et.al</i> dalam Heri Risal Bungkaes (2013:46)
3. Menurut Fandy (2021:124)	3. Sukrisno Agoes (2013:146)	3. Arum Ardiningsi (2018:26)	3. Wiyono (2007:137)
4. Sukrisno Agoes (2019:62)	4. Arum Ardiningsih (2021:25)	4. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017:36)	4. Hiro Tugiman (2019:32)
5. Menurut Alvin A. arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dan Chris E.Hogan yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2017:183)	5. Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens yang dialih bahasakan Herman Wibowo (2016:103)	5.M. Lyle Spencer dan M. Sine Spencer, Mitrani <i>et, al</i> yang dikutip oleh Surya Darma (2013:110-111)	5. Cris Kuntandi (2017:13)
6. <i>International Federatio of</i>	6. Sukrisno Agoes (2013:34)	6. Timothy J. Louwers, <i>et.al</i> (2013:43)	6. Amin Widjaja Tunggal (2013:17)
			7. <i>The insititute of auditor</i>
			8. Mark F. Zimbelman dkk yang diterjemahkan oleh novita puspasari, suhernita (2014:12)

<p><i>Accountants</i> (IFAC) dalam Tuankota (2011:78)</p> <p>7. Menurut Randal J. Elder Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens yang dialih bahasakan Herman Wibowo (2016:133-134)</p>	<p>7. Supriono (2015:12)</p> <p>8. Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011:64-65)</p> <p>9. Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley (2014:75)</p>		<p>9. Bono P. Purba (2015:10)</p> <p>10. Arum Ardianingsih (2018:76)</p> <p>11. Eko Sudarmanto (2021:215)</p> <p>12. Karyono (2013:92-94)</p> <p>13. Eko Sudarmanto dkk (2021:214)</p> <p>14. Karyono (2013:47)</p> <p>15. Hery. (2019:204)</p>
--	--	--	---



Gambar 2. 6 Bagan Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:99) menjelaskan bahwa:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Berdasarkan uraian landasan teori dan kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Skeptisisme Profesional berpengaruh terhadap Efektivitas pendeteksian kecurangan.

H₂ : Independensi auditor terpengaruh terhadap Efektivitas pendeteksian kecurangan.

H₃ : Kompetensi berpengaruh terhadap Efektivitas pendeteksian kecurangan.

H₄ : Skeptisisme profesional auditor, Independensi auditor dan Kompetensi auditor berpengaruh terhadap Efektivitas pendeteksian kecurangan.